



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 56 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI
KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ)
TAHUN 2018**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 dipandang perlu menetapkan pihak yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 41 dipandang perlu menetapkan status Terdaftar terhadap LPP PBJ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Status Terdaftar Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPP PBJ) Tahun 2018.

- Mengingat :
- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ) TAHUN 2018.
- KESATU : Penetapan Status Terdaftar Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : LPP PBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya dapat melaksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pelayanan peserta internal di lingkup kerjanya;
- KETIGA : Status Terdaftar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini;
- KEEMPAT : LPP PBJ yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan dapat diberikan sanksi;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Mei 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

DR. AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Direktur Sertifikasi Profesi;
4. Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN);
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pemerintah Provinsi Maluku.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN STATUS
TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN
DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH BAGI LEMBAGA
PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP
PBJ) TAHUN 2018.

NOMOR : 56 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 MEI 2018

**DAFTAR PENETAPAN STATUS
TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGI LPP PBJ TAHUN 2018**

| No | Nama Lembaga | Kabupaten/Kota Provinsi | Penanggung Jawab |
|----|---|--|--|
| 1. | Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) | Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten | Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) |
| 2. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Maluku | Kota Maluku Provinsi Maluku | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Maluku |

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Mei 2018

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

DR. AGUS PRABOWO